

Laporan Keuangan Semester I 2023

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2023

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tembilahan, 30 Juni 2023  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tembilahan  
  
Hari Winarca  
NIP. 197006221993031001



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
Pernyataan Tanggung Jawab .....	4
Ringkasan.....	5
Laporan Realisasi Anggaran.....	7
I. Neraca .....	8
II. Laporan Operasional.....	9
III. Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
IV. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	11
A. Penjelasan Umum .....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	30
V. Lampiran .....	35



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN  
Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 03, Tembilahan 29211  
Telepon : (0768) 21016, Faksimile : (0768) 21016  
Laman : lapastembilahan.kemenkumham.go.id Surel : lptbh@yahoo.com

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Catatan atas Laporan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Catatan atas Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tembilahan, 30 Juni 2023  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIA Tembilahan  
  
**Han Winaerca**  
NIP. 197006221993031001



Laporan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) Semester I Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara semester I Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 24.223.714,- atau mencapai 70 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.34.400.000,- . Realisasi Belanja Negara semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 7.623.878.297,- atau sebesar 56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.533.284.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 28,119,230,644,- yang terdiri dari:

<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000,
Piutang Bukan Pajak	1.120.619,
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1.120.619,
Persediaan	102.075.378,
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>127.195.997,</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	23.710.839.000,
Peralatan dan Mesin	4.144.535.557,
Gedung dan Bangunan	5.676.270.000,
Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.640.000,
Aset Tetap Lainnya	0,
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5.676.270.000)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>27.992.034.647,</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
Aset Lain-lain	120.216.500,
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(120.216.500)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>28.119.230.644,</b>

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.25.344.333,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 8.326.100.641,- Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebesar Rp 457.555.563,-, Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah senilai Rp (8.300.756.308,-) dan surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp 0,-, surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp (8.300.756.308,-) dan sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (8.300.756.308,-).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 28.332.593.778,- dikurangi Surplus/Defisit - LO sebesar (8.300.756.308,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 40.119.696,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 7.732.915.750,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp 27.804.872.916,-.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel I. Realisasi Anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	CATATAN	2023		% tmu Anggaran	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	34.400.000	24.223.714	70,42	20.078.310
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>34.400.000</b>	<b>24.223.714</b>	<b>70,42</b>	<b>20.078.310</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	4.470.469.000	2.646.033.373	59%	2.231.585.880
Belanja Barang	B.4	9.062.815.000	4.977.844.924	55%	4.319.810.037
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13.533.284.000</b>	<b>7.623.878.297</b>	<b>56,33</b>	<b>6.551.395.917</b>

Berdasarkan nominal, realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami peningkatan dibanding tanggal 30 Juni 2022, hal ini karena adanya peningkatan pagu belanja di tahun berjalan serta pelaksanaan kegiatan yang cenderung lebih cepat.

## II. NERACA

Adapun Neraca Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II. Neraca untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	24.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	102.075.378	11.533.320
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.10	1.120.619	-
PIUTANG BUKAN PAJAK	C.11	1.120.619	-
Jumlah Aset Lancar		127.195.997	11.533.320
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.15	23.710.839.000	23.710.839.000
Peralatan dan Mesin	C.16	4.144.535.557	4.037.722.156
Gedung dan Bangunan	C.17	5.676.270.000	5.676.270.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	89.640.000	89.640.000
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(5.629.249.910)	(5.153.892.113)
Jumlah Aset Tetap		27.992.034.647	28.360.579.043
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	120.216.500	120.216.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(120.216.500)	(120.216.500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>28.119.230.644</b>	<b>28.372.112.363</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.25	24.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	290.357.728	39.518.585
Pendapatan Diterima dimuka	C.27	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		314.357.728	39.518.585
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>314.357.728</b>	<b>39.518.585</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	27.804.872.916	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>27.804.872.916</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>28.119.230.644</b>	<b>39.518.585</b>



### III. LAPORAN OPERASIONAL

Adapun Laporan Operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	25.344.333	21.332.077
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>25.344.333</b>	<b>21.332.077</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.936.391.101	2.773.545.358
Beban Persediaan	D.3	654.451.559	723.996.389
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.988.243.801	3.634.515.801
Beban Pemeliharaan	D.5	189.573.045	177.087.400
Beban Perjalanan Dinas	D.6	99.885.572	25.164.978
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	457.555.563	361.676.145
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>8.326.100.641</b>	<b>7.695.986.071</b>
<b>OPERASIONAL</b>		<b>(8.300.756.308)</b>	<b>(7.674.653.994)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.12	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			9.589.994
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>9.589.994</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(8.300.756.308)</b>	<b>(7.665.064.000)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(8.300.756.308)</b>	<b>(7.665.064.000)</b>

Pada tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat akun belanja persediaan, sehingga tidak terdapat beban persediaan. Sementara untuk kumulasi beban belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas mengalami kenaikan karena pagu anggaran tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022 serta pelaksanaan kegiatan yang lebih cepat.

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Adapun Laporan Perubahan Ekuitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	28.332.593.778	28.078.533.260
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.300.756.308)	(7.674.653.750)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI		40.119.696	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	40119696	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	0
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7.732.915.750	6.531.317.607
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(527.720.862)	(1.143.336.143)
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>27.804.872.916</b>	<b>238.349.045.773</b>

Adapun angka ekuitas yang muncul pada Tahun Anggaran 2022 adalah besaran pertanggungjawaban bendaraha pengeluaran yang sudah di catat dan di kwitansikan, namun tanggal SP2D ditetapkan pada bulan berikutnya

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan (406225) adalah instansi Pusat di daerah yang berkedudukan di Jalan Prof M Yamin SH Nomor 03 Tembilahan, bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan mempunyai tugas sebagai berikut:

#### Tugas Pokok :

Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasarakatan narapidana / anak didik

#### Fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Masyarakat; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Visi** Kementerian Hukum dan HAM ialah "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum."

**Misi** Kementerian Hukum dan HAM ialah "Melindungi Hak Asasi Manusia."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tembilahan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tembilahan (406225). Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Data yang digunakan dalam laporan keuangan ini bersumber dari data GLP dan Aset yang diperoleh dari aplikasi SAKTI, disamping itu pencocokan data dengan OM-SPAN sudah disesuaikan dengan menganalisa data yang terdapat pada MON-SAKTI. Aplikasi SAKTI dan MON-SAKTI sebagaimana dimaksud dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sumber data BMN diperoleh yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tembilahan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Dasar

### Pengukuran

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Namun pada Satker Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing.

## Kebijakan

### Akuntansi

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah sebagai berikut:

## Pendapatan -

### LRA

#### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## Pendapatan-

### LO

#### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi,

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Dengan penjelasians ebagai berikut:

### *Aset Lancar*

#### **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### *Piutang Jangka Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### *Penyusutan*

#### *Aset Tetap*

#### **(8) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah

- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester II tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester II selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel V. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama kali*

#### **(9) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### *Realisasi*

#### B.1. Pendapatan

### *Pendapatan*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 17.500.000,-.

### *Rp 17.500.000,-*

Adapun rincian pendapatan berdasarkan akun adalah sebagai berikut:

Tabel VI Rekapitulasi Pendapatan Semester I Tahun Anggaran 2023

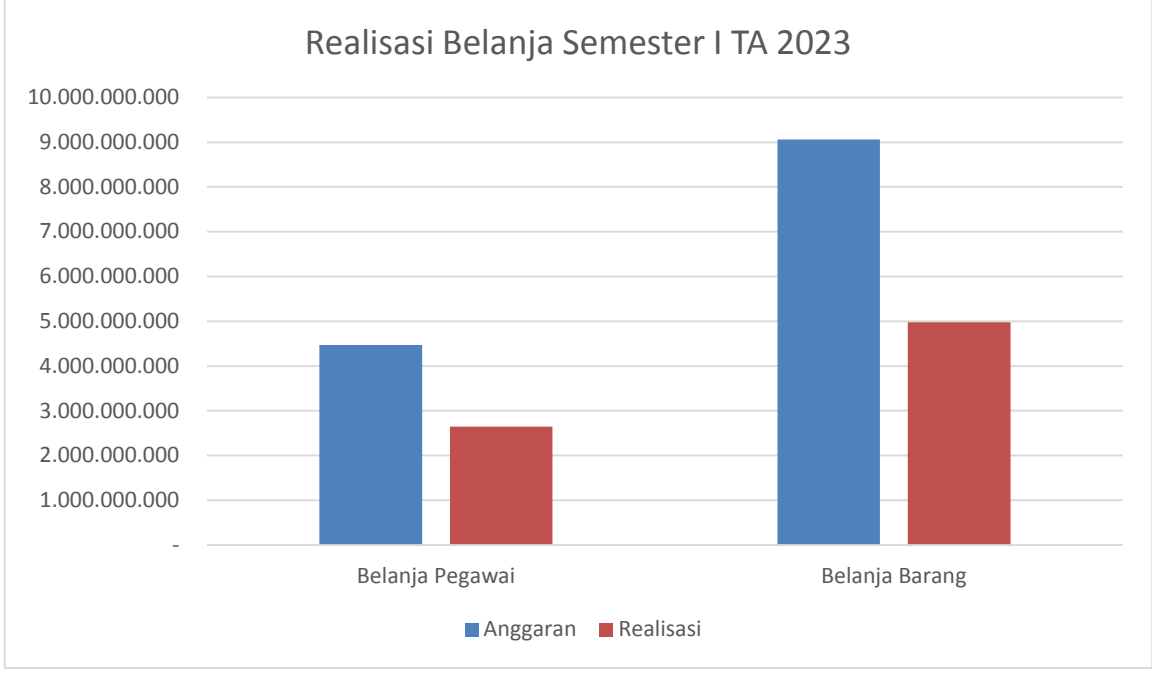
No	Akun	Nominal	Keterangan
1	425131	16.200.000,00	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Bangunan
2	425219	1.300.000,00	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
Total		17.500.000,00	

Pendapatan sewa dengan nilai Rp 16.200.000,- bersumber dari sewa rumah dinas dan pemanfaatan tanah guna kantin koperasi kantor,-, dan pendapatan Rp. 1.300.000,- bersumber dari pendapatan pembinaan kemandirian warga binaan masyarakat (pangkas rambut dan laundry)

**Realisasi Belanja Negara** **B.2. Belanja**

**Rp 5,909,405,703,-** Realisasi Belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 5,909,405,703,- atau senilai 56,33% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 13,533,284,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik I. Realisasi Anggaran Semester I TA. 2023



realisasi belanja secara keseluruhan sampai dengan 30 Juni 2023 berada diatas target semester I sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu 50%, adapun uraian persentase realisasi dari masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel VII. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	PAGU TA. 2023	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.470.469.000	2.646.033.373	59,19%
Belanja Barang	9.062.815.000	4.977.844.924	54,93%
Belanja Modal	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>13.533.284.000</b>	<b>7.623.878.297</b>	<b>56,33%</b>

**Belanja Pegawai** **B.3. Belanja Pegawai**

**Rp 2.646.033.373,-** Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 2.646.033.373,- dari total pagu senilai Rp 4.470.469.000,- dengan persentase realisasi sebesar 59.19%.

**Realisasi Belanja**

**B.4. Belanja Barang**

**Barang** Realisasi Belanja barang pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 4.977.844.924,- atau senilai 54.93 % dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 9.062.815.000,- Rincian anggaran dan realisasi **Rp** belanja Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:  
**4.977.844.924,-**

Tabel VIII. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	PAGU	REALISASI
Belanja Barang Operasional	3.521.794.010	7.025.295.000	50,13%
Belanja Barang Non Operasional	221.066.000	360.719.000	61,28%
Belanja Barang Persediaan	660.623.921	769.077.000	85,90%
Belanja Jasa	284.902.376	514.104.000	55,42%
Belanja Pemeliharaan	189.573.045	237.880.000	79,69%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	99.885.572	155.740.000	64,14%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	
Belanja penyusutan dan Amortisasi		-	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.977.844.924</b>	<b>9.062.815.000</b>	<b>54,93%</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.977.844.924</b>	<b>9.062.815.000</b>	<b>54,93%</b>

Secara keseluruhan, pada pelaksanaan belanja barang Tahun Anggaran 2023 tidak ditemui kendala berarti.

**Belanja Bantuan**

**B.5. Belanja Bantuan Sosial**

**Sosial Rp.0,-** Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Karena Satker 406225 tidak memiliki pagu anggaran untuk belanja bantuan sosial.

**Belanja Modal**

**B.6. Belanja Modal Tanah**

**Tanah Rp.0,-** Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Karena Satker 406225 tidak memiliki pagu anggaran untuk belanja modal tanah.

**Belanja Modal**

**B.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**Peralatan dan** Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Mesin** Rp 0,-. Karena Satker 406225 tidak memiliki pagu anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin **Rp 0,-**

**Belanja Modal**

**B.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

**Gedung dan** Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni Tahun Anggaran 2023 adalah **Bangunan Rp 0,-**. Karena Satker 406225 tidak memiliki pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

**Belanja Modal**

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 0,-*

**B.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Karena Satker 406225 tidak memiliki pagu anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

**Belanja Modal**

*Lainnya*

*Rp.0,-*

**B.10. Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- . Karena Satker 406225 tidak memiliki pagu anggaran untuk belanja modal lainnya.

**Kas di**

*Bendahara*

*Pengeluaran Rp*

*24,000,000,-*

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.24.000.000,- dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel IX. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Bank BRI	250.500	-
Uang Tunai	23.749.500	-
<b>Jumlah</b>	<b>24.000.000</b>	<b>-</b>

**Kas di**

*Bendahara*

*Penerimaan Rp*

*0,-*

**C.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Kas Lainnya dan**

*Setara Kas*

*Rp 0,-*

**C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp 0.

**Piutang Bukan**

*Pajak Rp*

*1.120.619,-*

**C.4. Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.120.619 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan sewa rumah negara bulan juni dan dibayarkan pada bulan juli.

**Bagian Lancar**

*Tagihan TP/TGR*

*Rp 0,-*

**C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Bagian Lancar****TPA****Rp0****C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Penyisihan****Piutang Tak****Tertagih –****Piutang Jangka****Pendek Rp 0-****C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

**Persediaan Rp****15,450,000,-****C.8. Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 15,450,000,- dan Rp 24,406,900,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Tagihan TP/TGR****Rp 0,-****C.9. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

**Tagihan****Penjualan****Angsuran Rp 0,-****C.10. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

**Penyisihan****Piutang Tak****Tertagih –****Piutang Jangka****Panjang Rp 0,-****C.11. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

**Tanah Rp****23,710,839,000,-****C.12. Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 23,710,839,000 dan Rp 23,710,839,000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Tanah untuk Tahun 2023.

<i>Peralatan dan Mesin Rp 4.414.535.557,-</i>	<b>C.13. Peralatan dan Mesin</b> Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 4.144.535.557,- dan Rp 4.037.722.156. Ada mutasi tambah dari pembelian dan transfer masuk Peralatan dan Mesin Tahun 2023.
<i>Gedung dan Bangunan Rp 5.676.270.000,-</i>	<b>C.14. Gedung dan Bangunan</b> Nilai Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp5.676.270.000 dan Rp5.676.270.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Gedung dan Bangunan ini untuk Tahun 2023.
<i>Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 89.640.000,-</i>	<b>C.15. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b> Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp89.640.000 dan Rp89.640.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ini untuk Tahun 2023.
<i>Aset Tetap Lainnya Rp 0,-</i>	<b>C.16. Aset Tetap Lainnya</b> Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- dan Rp. 0,-.
<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-</i>	<b>C.17. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)</b> Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Tahun 2023.
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (5.629.249.910), -</i>	<b>C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b> Akumulasi penyusutan asset tetap Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (5.629.249.910),- dan Rp. (5.153.892.113),-.
<i>Aset Tak Berwujud Rp0</i>	<b>C.19. Aset Tak Berwujud</b> Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Per 30 Juni 2023 dan 2022
<i>Aset Lain-Lain Rp120,216,500</i>	<b>C.20. Aset Lain-lain</b> Saldo Aset Lain-lain Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp120.216.500,- dan Rp120.216.500,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.
<i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset</i>	<b>C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</b> Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp (120.216.500,-). dan Rp (120.216.500,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

*Lainnya Rp (120.216.500,-),-* Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN Rp 24,000,000,-* **C.22. Uang Muka dari KPPN**  
Saldo Uang Muka dari KPPN per Per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.24,000,000,- dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp 290.357.728,-* **C.23. Utang kepada Pihak Ketiga**  
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp290.357.728,- dan Rp39.518.585,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja pegawai untuk pembayaran gaji induk bulan juli tahun 2023 dengan penerbitan SPM pada bulan juni dan penerbitan SP2D oleh KPPN pada tanggal 1 juli 2023

*Pendapatan Diterima di Muka Rp 0,-* **C.24. Pendapatan Diterima di Muka**  
Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp0- dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Ekuitas Rp 27.804.872.916,-* **C.25. Ekuitas**  
Ekuitas Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.804.872.916,- dan Rp.28.332.593.778,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

*Pendapatan PNBPNP Rp 25.344.333,-* **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 25.344.333,- dan Rp 21.332.077,-

*Beban Pegawai Rp 2.936.392.101,-* **D.2. Beban Pegawai**  
Jumlah Beban Pegawai pada Semester I Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.936.392.101,- dan Rp 2.773.545.358,-

<b>Beban Persediaan</b> Rp 654.451.559,-	<b>D.3. Beban Persediaan</b> Jumlah Beban Persediaan pada Semester I Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 654.451.559,- dan Rp.723.996.389,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
<b>Beban Barang dan Jasa</b> Rp 3.988.243.801,-	<b>D.4. Beban Barang dan Jasa</b> Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.988.243.801,- dan Rp. 3.634.515.801,-.
<b>Beban Pemeliharaan</b> Rp 189.573.045,-	<b>D.5. Beban Pemeliharaan</b> Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 189.573.045,- dan Rp.177.087.400,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
<b>Beban Perjalanan Dinas</b> Rp 99.885.572,-	<b>D.6. Beban Perjalanan Dinas</b> Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 99.885.572,- dan Rp. 25.164.978,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:
<b>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b> Rp 0,-	<b>D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b> Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
<b>Beban Bantuan Sosial</b> Rp 0,-	<b>D.8. Beban Bantuan Sosial</b> Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> Rp 457,555,563,-	<b>D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 457,555,563,- dan Rp.361.676.145,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.



<b>Beban</b>	<b>D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>
<b>Penyisihan</b>	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0.
<b>Piutang Tak</b>	
<b>Tertagih Rp 0,-</b>	
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>D.11. Beban Lain-lain</b>
<b>Rp 0,-</b>	Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.
<b>Surplus /Defisit</b>	<b>D.12. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional</b>
<b>Kegiatan Non</b>	Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp 0,- dan 2022 sebesar Rp0,-.
<b>Operasional Rp</b>	
<b>0,-</b>	
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>D.13. Pos Luar Biasa</b>
<b>Rp.0,-</b>	Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester I Tahun 2023 adalah Rp0,-.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

<b>Ekuitas Awal Rp.</b>	<b>E.1. Ekuitas Awal</b>
<b>28.332.593.778,-</b>	Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.28.332.593.778,- dan Rp.28.078.533.260-
<b>Defisit LO</b>	<b>E.2. Surplus (Defisit) LO</b>
<b>(Rp</b>	Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp
<b>8.300.756.308)</b>	8.300.756.308,-) dan (Rp 7.674.653.750,-). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<b>Penyesuaian Nilai</b>	<b>E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset</b>
<b>Aset Rp 0,-</b>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<b>Koreksi Nilai</b>	<b>E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan</b>
<b>Persediaan Rp</b>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Semester I tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.40.119.696,- dan Rp.0,-
<b>40.119.696,-</b>	

<i>Selisih revaluasi Aset Rp.0,-</i>	<b>E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap</b> Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-
<i>Koreksi Aset Non Revaluasi Rp.0,-</i>	<b>E.3.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi</b> Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk Semester II tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Koreksi Lain-lain Rp.0,-</i>	<b>E.3.5. Koreksi Lain-Lain</b> Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.
<i>Transaksi Antar Entitas Rp 7.732.915.750 ,-</i>	<b>E.4. Transaksi Antar Entitas</b> Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.732.915.750 ,- dan Rp 6.531.317.607,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.
<i>(DKEL) dan (DDEL) / Rp 0,- dan Rp 0,-</i>	<b>E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)</b> Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DKEL sebesar Rp 0,- dan DDEL Rp 0,-.
<i>Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp 0,-</i>	<b>E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar</b> Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar adalah Rp 0,-.
<i>Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Rp. 0,-</i>	<b>E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung</b> Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp.0,-

**Ekuitas Akhir****E.5. Ekuitas Akhir****Rp****27.804.872.916,-**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 27.804.872.916,- dan Rp 26.935.197.117,-

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA****F.1. Kejadian-kejadian penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

**F.2. Pengungkapan Lain-lain****F.2.1. Rekening Pemerintah**

Rekening yang Digunakan oleh Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 650924062251000

Nama Rekening : BPG092LPTEMBILAHAN

Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TEMBILAHAN

Surat Izin : S-1136/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 15 Juni 2020

**F.2.2. Pengelola Keuangan Satker**

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Nomor : W4.PAS.PAS2.KU.02.03 – 001 dan W4.PAS.PAS2.KU.02.03 – 002 tahun 2023 tentang Penunjukan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, PPABP dan Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

KPA : Hari Winarca

PPK : Fery Kustian

PPSPM : Ricky Renaldi

Bendahara Pengeluaran : Verry Ariras

Operator GLP : Arief Yunanda

Operator Aset dan Persediaan : Aries Wandana Rahman



Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIA Tembilahan

Hari Winarca

NIP. 197006221993031001